



MENAWARKAN SUBSTANSI SYARIAT ISLAM

Prof. Dr. Syaifi Ma'arif

Ketua Umum PP Muhammadiyah

Perdebatan mengenai syariat Islam, baik pada tataran wacana maupun politik terus bergulir. Namun sebuah kenyataan yang harus diterima, bahwa sampai detik ini belum ada pemahaman yang bersifat progresif mengenai syariat Islam. Perbedaan dalam memahami syariat dibiarkan menganga, belum ada dialog yang lebih maksimal. Hal tersebut diakui Syaifi Ma'arif, "kita perlu duduk bersama untuk memaknai syariat secara tepat", tegasnya. Namun satu hal yang patut diperhatikan, bahwa NU-Muhammadiyah mempunyai kesamaan visi dalam memahami syariat, bahwa syariat bukanlah hukum dan fikih, akan tetapi nilai-nilai dan moralitas yang menyemangati keadilan, kesetaraan, keadaban dan kemanusiaan. Islam harus dilihat secara substantif, bukan secara simbolik. **Zuhairi Misrawi**, Redaktur Jurnal Tashwirul Afkar berhasil mewawancarai Prof. Dr. Syaifi Ma'arif di kantor PP Muhammadiyah di Jln. KH. Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Berikut petikan wawancaranya:

Demokrasi yang mulai bergeliat di tanah air ditandai dengan munculnya pluralitas pemahaman keagamaan, di antaranya pemikiran yang mengarah pada formalisasi syariat Islam. Bagaimana Anda menanggapi fenomena tersebut?

Dari segi demokratisasi bagi masyarakat, saya kira baik-baik saja, tetapi yang saya khawatirkan adalah apakah pengagas formalisasi syariat sudah siap untuk itu; apa yang dimaksud syariat; apa sudah ada pemahaman yang tepat terhadap syariat. Pada waktu saya bertemu Abu Bakar Ba'asyir (Pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia), saya tanyakan kepada beliau, "apa yang kiai maksud dengan syariat?". Lalu beliau menjawab, "Ya, hukum". Saya berkata kepada beliau, "itu pemaknaan yang tidak betul. Syariat adalah agama itu sendiri (*al-dîn*) yang bersifat holistik. Esensinya adalah keadilan, bukan hukum-hukum yang bersifat partikular. Kalau kemudian

syariat dipahami sebagai potong tangan, nanti memberikan kesan, bahwa Islam adalah agama yang menakutkan". Karena itu, yang penting menurut saya perlu dilakukan diskusi yang mendalam mengenai syariat, sebab apabila kita salah dalam melangkah, maka hal tersebut akan menjadi bumerang. Saya melihat kalau "tujuh kata" dimasukkan dalam UUD 1945 tidak akan tercapai, karena hitung-hitungan politiknya lemah. Jumlahnya mereka hanya 8 sampai 10 %. Mereka seringkali emosi dalam menggolkan keinginannya, namun di sisi lain, mereka tidak realistis.

Walaupun mereka kurang memahami esensi syariat, tapi kenapa mereka terlihat begitu gigih untuk memperjuangkan formalisasi syariat Islam?

Menurut hemat saya, mereka melihat krisis yang berkepanjangan ini dikarenakan pengkhianatan terhadap "tujuh kata". Mereka melihat secara "hitam-putih", dan tidak mengkaji pengalaman-pengalaman negara lain, seperti Pakistan sejak awal yang ingin menegakkan syariat Islam, dan keadaan mereka tidak lebih baik. Mereka, menurut saya tidak mau melakukan perbandingan dengan negara-negara lain, di samping pemahaman mereka tentang syariat sangat lemah.

Ada klaim kesejarahan yang seringkali dijadikan justifikasi, bahwa perjuangan mereka di Konstituante sebenarnya tidak kalah, tapi tertunda?

Tapi kan di Konstituante dibekukan, karena tidak ada yang mendapat suara mutlak antara kelompok yang membela Islam sebagai dasar negara dan yang membela Pancasila. Akhirnya diselesaikan dengan dekrit 5 Juli 1959. Dekrit juga menciptakan demokrasi terpimpin, yang keadannya tidak semakin membaik. Saya rasa kita perlu duduk bersama, dan jangan main-main dengan syariat. Ada sebagian kalangan yang mengatakan, bahwa saya menolak syariat. Itu tidak betul. Beberapa orang Muhammadiyah menuduh itu. Tapi yang menarik bagi saya, NU dan Muhammadiyah itu kebetulan mempunyai visi yang sama dalam syariat Islam. Padahal kita tidak pernah berunding. Bagi saya, kalau kita ingin menegakkan syariat, itu harus dilakukan secara berangsur-angsur, misalnya ada UU Zakat, kita lihat nanti. Contoh yang lebih segar, barangkali penerapan syariat di Nanggoroe Aceh Darussalam (NAD), kita mencermati; apakah keadilan di sana ditegakkan, persamaan ditegakkan, perbedaan agama diakui, secara berangsur kita bisa memahami itu.

Tetapi kan di Aceh sendiri, yang dimaksud dengan syariat adalah pelarangan menggunakan celana pendek, harus menutup aurat, semua lebel menggunakan bahasa Arab, sebagaimana di Timur-Tengah?

Itu yang tidak benar. Mereka hanya melihat bentuk, tapi mengabaikan isi. Pemahaman semacam itu akan menciptakan pembonsaian terhadap

Islam. Itu yang saya khawatirkan. Nasehat bung Hatta bagi umat Islam, saya kira perlu dijadikan rujukan dalam memahami Islam, "Pakailah garam, terasa tapi tidak kelihatan, dan jangan menggunakan gincu, kelihatan tapi tidak terasa". Artinya, kalau menurut filsafat garam, ajaran Islam diharapkan dapat mewarnai cara bertindak, berpikir dan merasa, meski tidak diformalisasikan. Dampaknya pun, menurut saya, jauh lebih baik, karena akan terjadi internalisasi nilai-nilai. Yang demikian ini, lebih melihat pada isi, dari pada kulit. Karena itu, nasehat bung Hatta patut direnungkan kembali, sehingga kita dapat membaca realitas lebih tepat lagi. Orang-orang yang memahami syariat sebagai hukum dan fikih saja, menurut saya sangat simplistik.

Semestinya mereka dapat melihat syariat sebagai moralitas, bukan sebagai hukum?

Ya, semestinya begitu. Yang paling pokok dalam syariat adalah keadilan.

Ada kecenderungan dalam memahami syariat sebagai perang. Mereka menolak dialog?

Ya, kita persilahkan saja mereka perang, tapi setelah perang, mereka mau apa. Islam mau diapakan. Pada akhirnya, mereka akan mendapatkan kebuntuan. Kalau begitu caranya, mereka membunuh Islam atas nama iman.



Kalau seandainya nanti mereka berhasil, tentu dengan pemahaman terhadap syariat yang kaku dan rigid itu, apakah mereka dapat mewujudkan perubahan yang signifikan bagi bangsa ini?

Saya kira tidak. Mereka tidak akan dapat mewujudkan perubahan, bahkan hanya akan melahirkan konflik di antara umat Islam. Kelompok yang radikal itu, tidak mewakili arus besar masyarakat muslim. Mereka akan berhadapan dengan NU dan Muhammadiyah. Mereka tidak melihat realitas ini. Saya kok pesimis kalau mereka akan berhasil, karena mereka tidak mempunyai banyak dukungan di parlemen. Tidak ada mekanisme politik yang dapat mengakomodasi mereka. Kalau realitasnya seperti itu, saya ingin berkata

kepada mereka, "Apakah Anda ingin merebut piala kekalahan?" Kalau keinginan mereka dipaksakan di MPR, mereka akan kalah. Dampaknya, citra Islam Politik akan semakin buruk.

Menarik sekali Anda menyebut tadi citra Islam Politik. Apa yang mereka lakukan dengan kampanye formalisasi syariat Islam, sebenarnya dapat dicermati dari kegagalan Islam Politik dalam menggolkan gagasan mereka, sehingga mereka mengambil jalan ekstraparlementer?

Kita perlu melihat realitas politik, terutama pemilu 1999, berapa persen yang memilih partai Islam. Itu saja menunjukkan bahwa Islam Politik yang seperti itu, semakin lama akan semakin kehilangan peluang.

Tetapi kenapa kalangan Islam garis keras semakin lantang?

Menurut saya, mereka itu merasa semakin kepepet saja. Padahal landasan intelektual mereka lemah dan rapuh. Bisa Anda bayangkan, pemikiran yang dilandasi pemahaman yang rapuh, hasilnya bisa mencemaskan. Karena itu, saya khawatir Islam hanya akan dijadikan "mainan".

Melihat fenomena tersebut, tentu saja keinginan untuk memahami syariat secara tepat perlu dukungan dari NU-Muhammadiyah sebagai gerakan kultural?

Itu yang sedang digalakkan sekarang ini, bagaimana menampilkan wajah Islam

yang pluralis, inklusif dan toleran. Ini yang sedang diproses, dan diharapkan dapat mencapai hasil yang maksimal, walaupun peristiwa politik kemarin sedikit ada trauma hubungan NU-Muhammadiyah. Menurut saya, menggalakkan Islam yang *hanif*, juga tergantung keadaan. Bangsa kita sekarang ini dalam keadaan tidak normal. Pengangguran tinggi sekali. Dan mereka yang menganggur dan lemah, gampang termakan "janji-janji". Kalau begini terus, apakah bangsa ini akan bisa bertahan. Ini dulu yang harus dipikirkan, lalu kita mendiskusikan yang berkaitan dengan syariat. Pembacaan mereka terhadap problematika sangat lemah dan ahistoris. Pemahaman kalangan pro-syariat terhadap filsafat bangsa juga sangat lemah.

Mencermati dinamika NU dan Muhammadiyah, yang problematis adalah polarisasi kutub politik dan kutub kultural. Kadangkala kutub politik tidak mampu menangkap pemikiran yang bergeliat dalam kutub kultural?

Betul sekali. Saya mengamati NU pun demikian. Ketika kembali ke khittah 1926, NU sudah baik sekali, tetapi belakangan muncul "khittah plus" yang menandai keterlibatan NU dalam politik praktis. Saya kira Gus Dur dalam hal ini salah besar. Dia yang menggulirkan Islam Kultural kembali ke khittah 1926, tapi dia juga yang menyeret NU ke wilayah politik. Ini dampaknya buruk. Saya kira sudah saatnya NU kembali ke khittah, seperti halnya Muhammadiyah.

Walaupun saya dekat dengan Amien Rais, tapi hubungan Muhammadiyah dengan PAN sangat tegas, bahwa Muhammadiyah akan bergerak dalam wilayah kultural, yang berbeda sama sekali dengan PAN sebagai partai politik.

Jadi kita harus memantapkan kembali gerakan Islam Kultural?

Ya. Pertemuan NU-Muhammadiyah dan pemuka-pemuka agama merupakan upaya untuk memaknai agama secara lebih tepat dan proporsional. Karenanya, kita tidak cukup dengan aksi belaka, akan tetapi harus disertai dengan konsepsi. Yang patut dicatat justru menurut saya, bagaimana gerakan Islam Kultural senantiasa mendorong Islam Politik agar mengacu pada moralitas Islam. Kalau tidak, Islam Politik sama saja dengan kekuatan politik lainnya, bahkan sama dengan orang yang tidak beragama. Karena proses internalisasi nilai-nilai Islam tidak ada, mereka paling hanya melihat simbol belaka. Anda bila melihat *money politic* terjadi di mana-mana, termasuk dalam Islam Politik.

Selain apa yang Anda lakukan bersama Ketua Tanfidziah PBNU dan pemuka-pemuka agama, apakah ada kemungkinan untuk menggerakkan anak-anak muda agar ikut menyuarakan gerakan Islam kultural?

Saya kira itu sebuah keniscayaan. Anak-anak muda semestinya bergerak untuk menafsirkan doktrin-doktrin keagamaan yang sesuai dengan realitas kemanusiaan. Pemuda Muhammadiyah

dan Gerakan Pemuda Anshor sudah mulai melakukan hal tersebut, walau hanya sebatas kerja sama dalam hal tambak ikan. Dan kita perlu meng-embangkan kerja sama dalam bidang intelektual. Anak-anak muda NU-Muhammadiyah saya lihat sudah mulai bergeliat dalam ranah intelektual, dan kita mendukung upaya mereka untuk melakukan pembaruan pemikiran, sehingga mampu melihat esensi ajaran keagamaan dalam rangka mengukuhkan pluralisme di tanah air. Ikatan Muda Muhammadiyah (IMM) saya lihat belakangan ini sudah mulai merambah pada aras intelektualisme, saya setuju sekali dengan gerakan-gerakan mereka. Menurut saya, NU dan Muhammadiyah tidak ada pertentangan, tapi hanya perbedaan. Kalau bisa perbedaan itu bisa diperkecil, ya dengan upaya anak muda untuk mengambil inisiatif gerakan Islam Kultural.

Terutama dalam era desentralisasi?

Betul. Cuman perlu dibuat konsep bersama tentang otonomi daerah yang tepat; bagaimana menghadapi perda-perda syariat Islam. Semua itu harus diformulasikan dalam kerangka nasional, kebangsaan. Sebab kalau gerakan-gerakan garis keras tidak terkendalikan, kita sebagai bangsa akan terkeping-keping.

Apakah di masa mendatang Anda meyakini, bahwa wajah Islam Indonesia akan lebih toleran, inklusif dan pluralis?



mendatang, barangkali upaya dialog dengan kalangan Islam garis keras?

Itu harus dilakukan. Perlu ada duduk bersama dan diskusi intensif dalam memahami agama. Mereka itu menurut saya sangat normatif dalam memahami agama. Kalau ini diteruskan, maka wajah Islam akan tidak baik. Selain itu, yang penting men-dapatkan perhatian, keadilan perlu ditegakkan, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Kalau polisi bisa bertindak adil, saya kira gerakan-gerakan Islam garis keras akan layu dengan sendiri. Mereka merasa dipinggirkan sejak rezim Soekarno dan Soeharto, dalam waktu yang cukup lama. Sebenarnya kita juga merasa terancam, tapi kita tidak

Saya masih yakin itu akan tercapai, tapi harus diupayakan dengan langkah strategis dan konsep-konsep yang masuk akal sesuai dengan pemahaman yang benar terhadap agama. Yang paling penting juga adalah kesungguhan dan komitmen. Dan jangan sekali-kali terpancing dengan mereka, sebab kalau terpancing kita akan kehabisan energi. Ini untuk memenangkan masa depan umat Islam Indonesia. Kalau tidak, kita hanya besar secara populasi, tapi tidak ada lagi "umat Islam", karena kita hanya mengikuti orang lain. Kita nanti akan menjadi orang-orang asing, kita Islam, tapi tidak mempunyai substansi. Karena kita tidak bisa menggarami.

seradikal mereka yang cenderung melihat persoalan dengan kaca mata "hitam-putih". Mereka menghendaki jalan pintas bagi penye-lesaikan masalah yang sangat luas. Mereka beranggapan, kalau dite-rapkan syariat Islam, semua persoalan akan selesai. Inilah kelemahan mereka. Saya setuju sekali upaya duduk bersama dalam memahami agama. NU-Muhammadiyah mempunyai sarjana-sarjana yang cukup bermutu dalam bidangnya. Dan kita diskusi secara terbuka. Yang paling penting, menurut saya, bahwa "Islam bukan berani mati, tapi berani hidup. Mereka berani mati, karena tak mampu hidup". Saya kira, syariat dan agama harus dimaknai secara inklusif, pluralis dan progresif.*

Satu hal lagi yang perlu dilakukan di masa